

**EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI  
PERDESAAN (PNPM MPD) KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**

Oleh:

**Harianto**

Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau-Indonesia

**Indra Safri**

Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Universitas Islam Riau-Indonesia  
Correspondence Author: ndr4s4fri@yahoo.co.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode Kualitatif yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan angka. Penelitian ini menggunakan data Primer dan Sekunder yang diperoleh melalui kuisioner dan proses wawancara. Populasi penelitian ini adalah fasilitator yang bekerja pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau yang berjumlah 48 orang. Sedangkan sampel ditentukan secara sensus, karena jumlah populasi yang ada relatif sedikit, analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. PNPM Mandiri ialah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendamping, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa dari indikator perencanaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang dalam proses perencanaannya memiliki kendala banyaknya ketidakhadiran warga dalam proses musyawarah untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa, sementara sisi pelaksanaan keterlibatan masyarakat cukup tinggi dalam hal pelaksanaan kegiatan non fisik dibidang ekonomi melalui keterlibatan masyarakat baik dari segi kesediaan masyarakat meluangkan waktu dan tenaga serta kesediaan masyarakat dalam menyediakan bahan/materi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan UEP dan SPP, dan dari indikator pemeliharaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang masyarakat terlihat aktif dalam memelihara, menjaga, merawat dari apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan, baik dalam memelihara segala prasarana dan sarana, serta kesadaran masyarakat dalam melunasi dana simpan pinjam dari program SPP yang ada secara kontinyu. PNPM Mandiri Perdesaan pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pemberdayaan dan Masyarakat Desa

## **PENDAHULUAN**

Program Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Riau Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan Tambang sudah berlangsung dari tahun 2008 dimana ada 2 Program yang masuk untuk mendanai beberapa kegiatan di Kecamatan Tambang dengan mekanisme Pemberdayaan Masyarakat. Diantaranya PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) yang didanai oleh APBN sharing APBD Kabupaten dan Program Pemberdayaan Desa (PPD) didanai oleh APBD Provinsi sharing APBD Kabupaten.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Program ini digerakkan oleh sejumlah tenaga kerja yang bertugas sebagai fasilitator masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip program dalam arti harafiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan

uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan PNPM MPD sudah berjalan selama 8 (delapan) tahun, didalam perjalanan pelaksanaan tersebut berdasarkan data ditemukan keberadaan Unit Pengelola Kegiatan atau UPK yang mengelola kegiatan masyarakat kian bertambah besar. Khususnya dalam mengelola dana Simpan Pinjam Perempuan. Saat ini saja asset yang dimiliki seluruh UPK se Provinsi Riau yang terdiri dari 59 kecamatan nilainya sebesar Rp 183 Miliar, Diperhitungkan untuk 1 UPK di kecamatan bisa mengelola Rp 2 Miliar sampai Rp 4 Miliar. Dengan jumlah asset yang dimiliki tersebut, jumlah tunggakan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Saat ini jumlah tunggakan hingga April 2014 sebesar Rp 25 Miliar . Sedangkan penambahan asset bulan ini sebesar Rp 4 Miliar. (sumber:BPM Bangdes Provinsi Riau)

Besarnya tunggakan ini di harapkan dapat diperkecil dengan penguatan fungsi fasilitator dalam proses pengendalian, dengan proses tersebut masyarakat diharapkan untuk didampingi dan di awasi dalam pelaksanaan dan mampu untuk mencari akar permasalahan sehingga tunggakan dana program dapat di minimalisir. Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan program PNPM MPd melibatkan sebanyak 21 orang personil yang terdiri atas fasilitator kabupaten, fasilitator keuangan kabupaten, fasilitator kecamatan, fasilitator teknis kecamatan, asisten fasilitator teknis kecamatan, operator kabupaten, asisten mis kabupaten, kebutuhan tenaga fasilitator di Kabupaten Kampar belum memadai dengan tingkat kesulitan lokasi dan cakupan area kegiatan program. Sehingga proses pengendalian dan pengawasan dirasa masih belum maksimal dilakukan.

Secara khusus permasalahan pelaksanaan PNPM MPd di kabupaten Kampar dapat dijelaskan sebagai berikut : ditingkat Kabupaten sampai dengan periode Februari 2014 keseluruhan masalah yang telah dicatat adalah 16 masalah, sedangkan permasalahan – permasalahan lainnya adalah masalah kemacetan pada PPK I dan II pada saat tidak adanya pendampingan dari Fasilitator Kecamatan. Adanya kekosongan pendampingan selama 2 tahun anggaran yaitu Tahun 2005 dan Tahun 2006 sehingga banyak kegiatan UEP dan SPP yang tidak terpantau.

## **KERANGKA TEORI**

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenannya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Wiranto<sup>1</sup>, pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki keberagam kemampuan yang dapat di mobilisasi untuk perbaikan hidupnya.

Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkupi arah sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan. Menurut Suharmawijaya<sup>2</sup> : ”inovasi program pemberdayaan ekonomi merupakan upaya mengatasi persoalan ekonomi masyarakat komunitas tertentu. Kenyataan itulah yang menjadikan sebagian program kabupaten/ kota menyatukan antara pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.”

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan kelompok di dalam lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah dalam berbagai aspek kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam perubahan sosial : yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi , maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampi menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

Penjelasan di dalam Ensiklopedia Agama dan Filsafat bahwa efektivitas adalah menunjukkan taraf tercapainya tujuan. Suatu program atau usaha dikatakan efektif kalau usaha mencapai tujuannya. Secara ideal efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran yang dapat dihitung seperti dalam persentase (Ensiklopedia Agama dan Filsafat, 2001: 101).

Dapat disimpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah keberhasilan suatu aktifitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dan apabila tujuan dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dikatakan

---

<sup>1</sup> Wiranto, T. 1999. *Pokok-pokok Pikiran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah*. Cisarua.

<sup>2</sup> Suharmawijaya., Dadang S., dkk, 2007, *Memantau Daerah Menyemai Kemajuan*

(*Otonomi Daerah dan Otonomi Award di Jawa Timur*), diterbitkan oleh JawaPos Institute of Pro Otonomi.

efektif dan sebaliknya apabila tujuan dan target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya maka aktifitas itu dikatakan tidak efektif.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya; masyarakat kurang mampu) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hasmaeni dan Riley (Suharto, 2004) mengembangkan delapan indikator, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu ; kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power within*).

Menurut Sumodiningrat (2002, dalam Sulistyaningsih, 2004: 82) Pemberdayaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Menurut Wiranto (1999), pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.

Untuk mengelola sumber daya tersebut, model pembangunan (*community development/CD*) merupakan alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat pedesaan. Di mana sasaran utama CD adalah menolong masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah dengan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Hasil akhir dari CD ini adalah terciptanya masyarakat yang mandiri atau masyarakat yang mampu menciptakan prakarsa sendiri (*self propelling*) dan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan (*sustainable economic growth*) dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sejalan dengan itu, Gany (2001) juga berpendapat bahwa konsep pemberdayaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksi yang ada pada suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktivitas pemberdayaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu :

- a. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).

- b. Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
- c. Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.

Oleh karena itu, pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat juga ditujukan untuk mengikis fenomena kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti (Sulistyo-Basuki,2006:24). Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat yang mewakili jumlah, intensitas atau frekuensi. Peneliti menggunakan dirinya sendiri sebagai perangkat penelitian, mengupayakan kedekatan dan keakraban antara dirinya dengan obyek atau subyek penelitiannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sulistyo Basuki, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mencoba mencari penjelasan yang tepat dan cukup dari semua aktifitas, obyek, proses dan manusia. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta, identifikasi dan meramalkan hubungan dalam dan antara variabel.

Penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor- faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor- faktor tersebut untuk dicari peranannya (Arikunto, 2010: 151).

Dalam penelitian ini desain metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu merangkum sejumlah data besar yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Data yang dimaksud adalah hasil wawancara mendalam dengan fasilitator PNPM yang terdapat di Kabupaten Kampar.

## **PEMBAHASAN**

### **Hasil Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Tambang**

Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Tambang terkhusus dalam pemberdayaan bidang ekonomi mendapat respon yang baik dari kalangan masyarakat begitu pun juga dengan aparat pemerintah setempat. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Tambang mengenai keberadaan Program PNPM Mandiri Perdesaan diwilayahnya menyatakan bahwa:

Menurut Mula Tua: *“Keberadaan Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Tambang ini diharapkan banyak membawa perubahan yang signifikan utamanya dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat Kecamatan Tambang. Diharapkan terjadinya proses*

*pembelajaran politik demokrasi bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu untuk menganalisis, mampu dalam menyatakan pendapat, berdiskusi, serta mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan”*

Sedangkan menurut salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Tambang menyatakan bahwa:

Menurut Ridho: *“Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Tambang ini kami harapkan jangan menjadi seperti program-program sebelumnya yang datang tanpa diundang pulang tak diantar. Maksudnya bahwa program sebelumnya terkadang diberikan tanpa kita butuhkan dan pada saat pelaksanaannya para pengelolanya kenyang sendiri. Mereka hanya memberikan sisa-sisanya kepada masyarakat. Bahkan kita tidak tahu apa yang menjadi hasil dari programnya”*.

Sebagaimana di dalam perencanaan kegiatan atau pada proses perencanaan program kegiatan yang dianggap cocok ditetapkan di desa, diarahkan dalam menyampaikan gagasan, ide, keluhan-keluhan yang dirasakan selama ini yang kemudian ditampung untuk dijadikan prioritas usulan. Pada dasarnya dari hasil proses perencanaan program pada desa-desa di Kecamatan Tambang banyak ide serta usulan yang dilemparkan masyarakat. Namun tidak semua usulan tersebut dapat dipenuhi dan dilaksanakan.

### **Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Bidang Pembangunan Non Fisik.**

Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk Kecamatan Tambang dibidang pembangunan non fisik dilakukan di bidang kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Menurut Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tambang menyatakan bahwa untuk dibidang pembangunan non fisik memiliki 2 kecenderungan yang diminta oleh masyarakat adalah tambahan modal usaha dan usaha baru yang dirintis. Usaha yang dilakukan cukup bervariasi mulai usaha perkebunan, peternakan dan usaha keripik nenas.

Dari hasil observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa di Kecamatan Tambang terdapat 11 kelompok usaha usaha kecil menengah, yang skalanya masih menengah ke bawah atau masih dalam taraf industri rumah tangga. Melihat kondisi yang ada, UKM ini sangat potensial untuk dikembangkan utamanya dalam menunjang pendapatan masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Untuk pengembangan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di Kecamatan Tambang terdapat beberapa kelompok usaha yang terdaftar. Beberapa kelompok tersebut mempunyai jenis usaha yang pada umumnya bergerak dalam usaha peternakan dan selebihnya usaha jualan.

Dari data yang diambil dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tambang dari tahun 2012 – 2014 menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok usaha tersebut diberikan dana sebesar Rp. 398.429.600,- dengan sifat dana sebagai pinjaman dan akan digulirkan kembali pada kelompok yang terdaftar pada usaha ekonomi produktif perguliran. Untuk kegiatan simpan pinjam SPP yang dikelola khusus oleh perempuan di Kecamatan Tambang ini terdapat 11 kelompok usaha yang terdaftar yaitu kelompok usaha simpan pinjam khusus perempuan (SPP). Industri keripik Nenas adalah salah satu industri kerajinan rumah tangga yang ada di Kecamatan Tambang. Hingga saat ini, kelompok Saudara.

Menurut Ibu Sunarti: *”usaha ini saya dirikan pada tahun 2012, dengan modal yang kecil. Waktu itu, kondisi sangat miskin, pendapatan sebagai petani ladang hanya cukup untuk membeli*

*beras, ikan dan sayur sehari-hari. Waktu itu, saya mulai berpikir, kira-kira usaha yang bisa menambah penghasilan. Akhirnya, saya mencoba menekuni Tenun Ikat, hasilnya belum bagus, tidak rapi tapi laku dijual. Lama kemudian, berkembang. Sesuai pengalaman, sarung yang saya buat tambah bagus. Alatnya sederhana, banyak dijual, demikian juga dengan bahannya”*

Menurut Ibu Dahma: “*dulunya....saya hanya ibu rumah tangga biasa, tidak punya pekerjaan. Akhirnya saya ikut-ikutan dengan Ibu Leli. Awalnya, cuma melihat-lihat saja, akhirnya saya beranian juga untuk mencoba, apalagi alat yang digunakan biasa, tidak susah. Bahannya disiapkan oleh Ibu Leli. Sekarang, saya sudah bisa membuat sendiri keripik nenas’*. Sepintas lalu program simpan pinjam perempuan ini memang agak mirip dengan kegiatan usaha ekonomi Produktif adapun yang membedakan antara Simpan pinjam perempuan dengan usaha ekonomi produktif ini adalah pada Simpan pinjam perempuan yang mengelolanya adalah khusus perempuan sedangkan di usaha ekonomi produktif dikelola oleh campuran antara perempuan dan laki-laki yang mempunyai usaha sendiri.

Secara umum kegiatan simpan pinjam yang pengelolaannya diberikan kepada perempuan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan. Sedangkan secara khusus kegiatan simpan pinjam khusus perempuan ini adalah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha serta mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan

Dari keterangan yang diperoleh dari ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Tambang menyatakan bahwa untuk kegiatan ini alokasi dana yang diberikan maksimal 25 % dari alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM). Dalam alokasi dana tersebut setiap desa diberikan dana tidak boleh lebih dari 10 juta dan dari 10 juta tersebut sudah termasuk biaya operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang bertempat dikecamatan sebanyak 2 % dan 3 % untuk biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Lanjut dikatakan bahwa dalam pengelolaan kegiatan ini ada beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan oleh setiap kelompok yang ingin mendapatkan dana, ketentuan tertentu adalah sebagai berikut:

Kelompok yang berhak menerima SPP adalah kelompok:

- a. Beranggotakan perempuan yang mempunyai yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun
- b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dan simpanan dan dan pinjaman yang telah disepakati.
- c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan
- d. Kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik
- e. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
- f. Penyaluran dana BLM tidak diperkenankan adanya syarat agunan kepada kelompok



- g. Pengembalian dana dari dana SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP kembali baik kelompok lama ataupun kelompok yang baru sesuai dengan ketentuan dana perguliran.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa setiap desa memperoleh alokasi dana yang disesuaikan dengan pembiayaan dana dalam proposal kegiatan yang diusulkan dari desa masing-masing lalu di verifikasi kembali oleh tim verifikasi, keragaman biaya yang di berikan oleh UPK tingkat Kecamatan disesuaikan dengan kegiatan dan jumlah orang serta perkembangan usaha yang di miliki oleh tiap kelompok. Tiap desa memperoleh dana alokasi yang disepakati untuk dibagi rata per-kelompok dalam setiap desa yang mengajukan proposal permohonan kegiatan. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut diatas, untuk kelompok SPP di Kecamatan Tambang terdapat 11 kelompok.

Secara umum, semua tabel yang ditampilkan tersebut menggambarkan tentang operasionalisasi PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Kegiatan yang dilakukan tersebut mempunyai sifat peruntukan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Tambang. Dari apa yang telah dilaksanakan di Kecamatan Tambang tersebut dapat diukur bahwa indikator yang digunakan untuk menentukan jenis-jenis kegiatan masyarakat dalam program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang yakni terbatasnya modal usaha untuk peningkatan pendapatan masyarakat, dikarenakan adanya pembagian yang dilakukan oleh pihak pelaksana program ini secara merata. Serta diharapkan untuk seterusnya pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Tambang dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan yang didalamnya berupa pelatihan usaha dan dukungan kelembagaan, dan penghantaran sumber daya berupa bantuan modal usaha dan dukungan sarana dan prasarana kepada kelompok usaha kecil dan menengah.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa indikator yang telah dikemukakan diatas mencerminkan suatu upaya menuju suatu perubahan yang berarti dan bermanfaat bagi masyarakat utamanya dalam pemenuhan kebutuhan yang dirasakan sangat mendasar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karenanya jenis kegiatan/program tersebut perlu untuk dilaksanakan sebagai konsekwensi tanggungjawab moral pemerintah demi tercapainya kesejahteraan rakyat utamanya didaerah pedesaan.

### **Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**

Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam program PNPM Mandiri Perdesaan adalah adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari pelaksanaan perencanaan kegiatan sampai pada pelaksanaan kegiatan non fisik yang telah disepakati.

Sebagaimana mekanisme kerja yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa pola partisipasi masyarakat memang sangat dominan dalam semua tahapan kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan hasil kegiatan. Oleh karena itu kita tidak dapat pungkiri dan memahami dengan jelas bahwa program PNPM Mandiri Perdesaan hanya bisa berhasil jika mendapat respon dan perhatian dari masyarakat. Partisipasi masyarakat didalam tahapan PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilihat dari tiga sisi yaitu sebagai berikut ini :

## **Partisipasi Dalam Perencanaan**

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilihat dari kehadiran masyarakat dalam proses perencanaan program pada desa-desa di Kecamatan Tambang yang dilakukan oleh pelaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat dusun/lingkungan. Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Tambang mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan diwilayahnya menyatakan bahwa:

Menurut Mula Tua: *“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang ini memiliki kendala, dikarenakan banyaknya ketidakhadiran warga dalam proses musyawarah untuk kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. diakibatkan oleh bersamaannya kegiatan sehari-hari warga sehingga sangat sulit untuk menghadiri musyawarah tersebut”*. Oleh karena itu hendaknya setiap kegiatan atau tahapan PNPM Mandiri Perdesaan utamanya dalam Musyawarah di tingkat desa diharapkan agar tetap memperhatikan jadwal atau kegiatan sehari-hari masyarakat sebagai sasaran program, mengingat bahwa dalam proses penentuan prioritas kegiatan disitulah letak awal perencanaan pembangunan yang akan dilakukan dan keterlibatan masyarakat disini sangat diperlukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Selanjutnya dalam proses musyawarah ini, masyarakat tidak hanya dituntut kehadirannya akan tetapi dalam proses penentuan ini masyarakat dituntut untuk lebih aktif menyampaikan ide, usulan, serta kebutuhan mereka serta penentuan jenis kegiatan yang dibutuhkan.

Selanjutnya dalam proses penentuan prioritas kegiatan ini, masyarakat tidak hanya dituntut kehadirannya akan tetapi dalam proses ini, masyarakat dituntut untuk lebih aktif menyampaikan ide, usulan, serta kebutuhan mereka serta penentuan jenis kegiatan yang dibutuhkan. Dari hasil wawancara dengan Fasilitator bid. pemberdayaan UPK Kecamatan Tambang mengenai Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan menyatakan bahwa:

Menurut Yuliani: *“Keaktifan masyarakat dalam menyampaikan ide, usulan, serta kebutuhan mereka serta penentuan jenis kegiatan yang diprioritaskan terliat memiliki kendala, dikarenakan masih ada sejumlah masyarakat yang hanya datang, duduk, dengar, dan diam dalam proses penentuan kegiatan. Hal tersebut diakibatkan dari adanya budaya masyarakat kita yang masih takut, dan malu untuk berbicara dimuka umum sehingga mereka terkesan hanya datang untuk turut meramaikan dan menerima apapun keputusan yang diambil. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak untuk lebih meningkatkan keaktifan masyarakat tersebut baik melalui peningkatan SDM melalui pendidikan baik secara formal maupun non formal.”*

Perlu kita pahami bersama bahwa keaktifan masyarakat dalam menyampaikan ide atau gagasan mencerminkan bahwa masyarakat sudah mengerti dan memahami bahwa setiap masalah atau kendala yang dihadapi, yang tahu dan yang merasakannya adalah masyarakat itu sendiri oleh karenanya yang membuat solusi dari permasalahan tersebut adalah harus dari kalangan masyarakat itu sendiri (*bottom up*).

## **Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan non fisik dibidang ekonomi melalui keterlibatan masyarakat baik dari segi kesediaan masyarakat

meluangkan waktu dan tenaga serta kesediaan masyarakat dalam menyediakan bahan/materi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan UEP dan SPP. Dari hasil wawancara Kepala UPK Kecamatan Tambang mengenai Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan menyatakan bahwa:

Menurut Sunarti: *“Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Program PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat tidak sepenuhnya mencapai 100% dimana hal ini dipengaruhi oleh tahapan atau jadwal pelaksanaan kegiatan seringkali bertabrakan dengan pekerjaan sehari-hari sehingga mengakibatkan masyarakat lebih memprioritaskan pekerjaan sehari-hari mereka sebagai sumber pendapatan utama, namun dari segi minat secara menyeluruh masyarakat masih terus memberikan partisipasi dalam segala kerja kelompok baik dalam UEP dan SPP.”*

Dari hasil wawancara dengan Ketua UPK Kecamatan Tambang mengenai Partisipasi masyarakat dalam penyediaan bahan/materi Program PNPM Mandiri Perdesaan menyatakan bahwa:

Menurut Sunarti: *“Partisipasi masyarakat dalam penyediaan bahan/materi Program PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang bagus pasalnya tingginya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan segala aturan peminjaman dana sebagai pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat sesuai dengan dokumen yang dikirim ke pusat agar memudahkan partisipasi masyarakat pada tingkat pemeliharaan hasil kegiatan tersebut.*

### **Partisipasi Dalam Pemeliharaan**

Partisipasi masyarakat dalam Program ini juga dilihat dari seberapa aktifnya masyarakat dalam memelihara, menjaga, merawat dari apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan. Mengingat bahwa dalam program yang merencanakan, melaksanakan dan yang merasakan manfaatnya adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dari apa yang telah berhasil dilaksanakan hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat dalam segi perawatan ataupun pemeliharaannya secara kontinyu. Dari hasil wawancara dengan ketua UPK Kecamatan Tambang mengenai Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil Program PNPM Mandiri Perdesaan menyatakan bahwa:

Menurut Sunarti: *“Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan Program PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang cukup bagus pasalnya tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga serta merawat hasil kegiatan utamanya hasil pembangunan sarana dan prasarana. Hal tersebut disebabkan oleh karena yang akan memanfaatkan prasarana tersebut adalah masyarakat itu sendiri. dikarenakan banyaknya ketidakhadiran warga dalam proses musyawarah untuk kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. diakibatkan oleh bersamaananya kegiatan sehari-hari warga sehingga sangat sulit untuk menghadiri musyawara tersebut.*

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Gambaran mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
  - a) Dilihat dari indikator perencanaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang ini, dalam proses perencanaannya memiliki kendala, dikarenakan banyaknya ketidakhadiran warga dalam proses musyawarah untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa.
  - b) Dilihat dari indikator pelaksanaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang ini dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan non fisik dibidang ekonomi melalui keterlibatan masyarakat baik dari segi kesediaan masyarakat meluangkan waktu dan tenaga serta kesediaan masyarakat dalam menyediakan bahan/materi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan UEP dan SPP.
  - c) Dilihat dari indikator pemeliharaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang masyarakat terlihat aktif dalam memelihara, menjaga, merawat dari apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan, baik dalam memelihara segala prasarana dan sarana, serta kesadaran masyarakat dalam melunasi dana simpan pinjam dari program SPP yang ada secara kontinyu.
2. Efektivitas PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
  - a) Program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang setiap tahun mengalami peningkatan baik dari sisi peningkatan jumlah dan kualitas masyarakat yang dapat diberdayakan, peningkatan dalam sarana dan prasarana, serta yang paling penting adalah terus meningkatnya minat dari masyarakat dalam mengapresiasi program ini.
  - b) PNPM Mandiri Perdesaan pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan bentuk pengembangan dari model perencanaan pembangunan yang berpihak pada pembangunan manusia khususnya masyarakat miskin di Kecamatan Tambang.
  - c) Efektivitas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tambang setelah melihat mekanisme pembagian kinerja ini, terlihat ada beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang terlihat mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dari PNPM Mandiri Perdesaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bateman, Snell. 2002. *Management competing in the new era*; mcgraw-companies, New York.

- Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
- Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, M. D. W., Ayu, A., & Purwati, M. L. H. (2021). Effect of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
- Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 211-219.
- Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
- Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tentang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 9(2), 167-184.
- Ohama, Yutaka, 2001, *Conceptual Framework of Participatory Local Social Development*, Nagoya: JICA. Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. *Editor*, 12, 219.
- Rauf, R., Zainal, Z., & Maulidiah, S. (2020). The Community Participation Dalam Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(01), 60-76.
- Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society's Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(3), 1030-1046.
- Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 6(2), 27-38.
- Riauan, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C., & Qurniawati, E. F. (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. *Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi*, 171.
- Riauan, M. A. I., & Aziz, A. (2019). Professional Gamer: The Meaning on 'Point Blank Online' Play. *Jurnal The Messenger*, 11(1), 18-26.
- Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna Perilaku Merokok di Kalangan Dosen Universitas Islam Riau. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 207-222.
- Riauan, M. A. I., Aziz, A., Fitri, A., Mulyani, O., & Zainal, Z. (2020). Stereotip Budaya Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 5(1), 43-56.
- Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, INCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 282). European Alliance for Innovation.
- Salman, Darmawan. 2005. *Apa dan Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat*, Makalah, PSKMP Unhas, Makasar.

- Suharmawijaya., Dadang S., dkk, 2007, *Memantau Daerah Menyemai Kemajuan (Otonomi Daerah dan Otonomi Award di Jawa Timur)*, diterbitkan oleh JawaPos Institute of Pro Otonomi.
- Sumodiningrat G. 2001. Menuju Swasembada Pangan Revolusi Hijau. Jakarta: RBI.
- Suharto, Edi. (2007). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ>(Halim et al., n.d.)
- Trijupitasari, R., & Riauan, M. A. I. (2017). Pola Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. *MEDIUM*, 6(1), 78-86.
- Yogia, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
- Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 19-36.
- Zainal, F. N. P. (2021, December). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District. In *ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE* (Vol. 9, p. 169).
- Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2).